



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 • 5730316
Fax +62 21 5733437

ISBN 978-623-91312-5-8



9 786239 131258



2021

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM



2021

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Direktur Jenderal KSDAE
ISBN	978-623-91312-5-8
Pengarah	Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua	Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penyunting	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penulis	Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM. Armanita Gumardes, S.Hut. Aryo Ganesworo, S.E. Arindy Pratiwi, S.E.
Desain Grafis	Staf Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Ilustrasi Cover	Foto: Fakhrol Maulana

ISBN 978-623-91312-5-8



2021

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2020

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: pa.helpmail@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Nomor: P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024**

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2021;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/

- SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
 18. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2020

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM,



Ir. WIRATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

NOMOR: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2020-2024**

Anggrek

Lokasi:
Taman Nasional Gunung Merapi

Dokumentasi:
Afri Sabowo



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2021 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Penetapan Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 16 November 2020

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,


Ir. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen KSDAE	i
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	13
BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	19
BAB III DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	23
BAB IV ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	31
A. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70%	35
B. Jumlah KPHK non-TN yang terbentuk dan beroperasi	36
C. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	37
D. Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	37
E. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel	38
F. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	38
G. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan konservasi	39
H. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan konservasi	40
I. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 unit)	40
BAB V PENGARUSUTAMAAN	43
BAB VI PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peran Ditjen KSDAE pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	15
Gambar 4.1. Pagu Alokasi Anggaran per Jenis Belanja dan Sumber Dana	33
Gambar 4.2. Jumlah KK dengan nilai efektifitas pengelolaan minimal 70%	35
Gambar 4.3. Jumlah KPHK non-TN yang terbentuk dan beroperasi	36
Gambar 4.4. Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk (kumulatif)	38
Gambar 4.5. Jumlah wisatawan mancanegara (kumulatif)	39
Gambar 4.6. Jumlah wisatawan nusantara (kumulatif)	40
Gambar 4.7. Jumlah kemitraan pengelolaan Kawasan konservasi (kumulatif)	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program dan Sasaran Program bidang KSDAE	20
Tabel 2.2.	Target Indikator Kinerja Program Tahun 2021	21
Tabel 3.1.	Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional	24
Tabel 3.2.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	25
Tabel 3.3.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	27
Tabel 3.4.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	28
Tabel 4.1.	Alokasi anggaran pada setiap program KLHK dalam rencana kerja tahun 2021	32
Tabel 4.2.	Alokasi anggaran pada program Ditjen KSDAE dalam rencana kerja tahun 2021	32
Tabel 4.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019	34



Lokasi:

Dokumentasi:

Pegunungan Bromo Tengger
Semeru

Lokasi:
Taman Nasional BTS

Dokumentasi:
-



BAB I

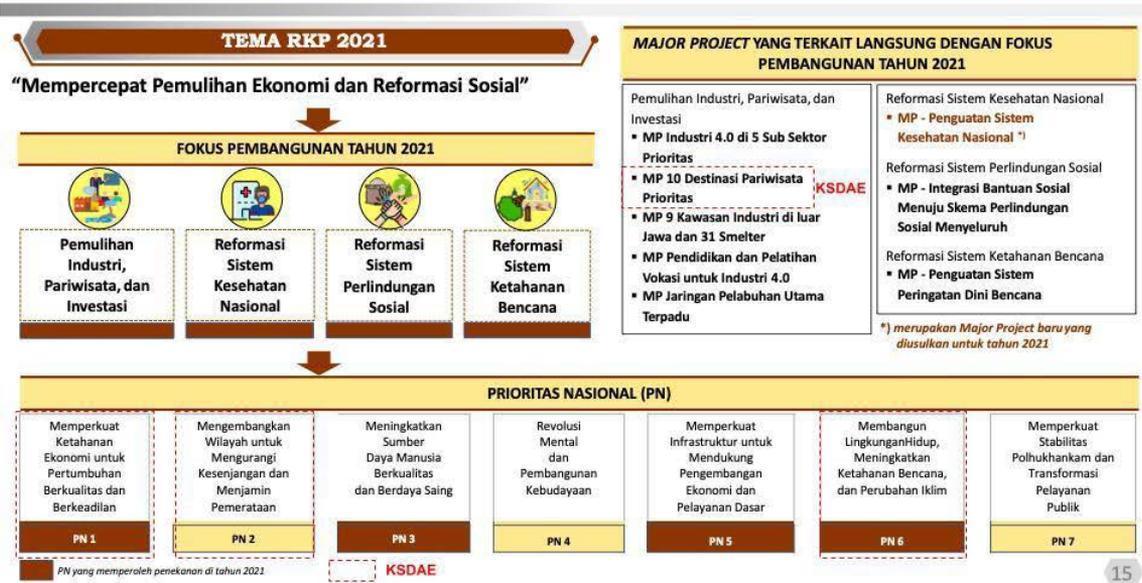
PENDAHULUAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, seluruh dunia termasuk di Indonesia, terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan resesi ekonomi di dunia. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan nasional di tahun 2021 yaitu dengan menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Fokus Pembangunan Tahun 2021 pada Rancangan Awal RKP adalah 1) Pemulihan Industri Pariwisata dan Investasi, 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, 3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, strategi pelaksanaan fokus pembangunan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*-MP) dengan daya ungkit tinggi sebanyak 41 Proyek.

Adapun 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada Rancangan Awal RKP tahun 2021 yaitu 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan

TEMA, FOKUS, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (1/2)



Gambar 1.1. Peran Ditjen KSDAE pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Dalam pencapaian target kinerja, khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan *Major Project*, penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan *Major Project* (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, antara lain pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi terkait kemitraan konservasi terkait pelibatan masyarakat dalam mengelola



Kawasan konservasi sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari Kawasan dan ikut turut serta secara sadar menjaga Kawasan konservasi agar tetap lestari. Disamping itu pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik yang berfungsi sebagai pengelolaan keanekaragaman hayati, Ditjen KSDAE berhasil meningkatkan populasi spesies prioritas pada site monitoring seperti populasi Harimau Sumatera (Tahun 2014 = 71 ekor, Tahun 2019 = 122 ekor), Gajah Sumatera (2014 = 313 ekor, 2019 = 344 ekor), Badak Jawa (2014 = 58 ekor, 2019 = 72 ekor), Orang Utan (2014 = 1.441 ekor, 2019 = 2.408 ekor), dan populasi lainnya. Pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE ikut mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, serta membangun ekowisata bersama masyarakat seperti ekowisata di Tangkahan-Taman Nasional Gunung Leuser, ekowisata di Taman Nasional Tanjung Puting, ekowisata di Kampung Saporkren-Papua Barat, ekowisata di Taman Nasional Merapi. Pada kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE ikut memfasilitasi terbentuknya 61 unit Kawasan Ekosistem Esensial di daerah. Capaian-capaian tersebut di atas perlu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang disertai aksi-aksi korektif pada rencana 5 tahun berikutnya (2020-2024), termasuk pada Tahun 2021.

Nycticebus coucang

Lokasi:

-

Dokumentasi:

-

Lokasi:
Taman Nasional Gunung Merapi

Dokumentasi:



Stigi

Lokasi:

-

Dokumentasi:

Ririn Wulandari



BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini memperhatikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung Rencana Pembangunan Nasional tahun 2021. Target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2021 diantaranya:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,96.
2. Penurunan emisi GRK sebesar 24,14 %.
3. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 26,37 %.
4. Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) sebesar 65 juta hektar.
5. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Ibu Kota Negara seluas 5.600 hektar.
6. Pelepasan kawasan hutan untuk Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar.

Dukungan Kementerian LHK pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 telah sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis, meliputi pilar ekologi, pilar ekonomi dan pilar sosial tata kelola yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Pencapaian target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum dalam target pembangunan nasional tahun 2021 dilaksanakan melalui empat Sasaran Strategis dan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, (2) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (4) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program seperti tercantum pada tabel 2.1., sebagai berikut:

Tabel 2.1. Program dan Sasaran Program bidang KSDAE

No	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima
2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati 3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 4. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. 5. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 6. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi
3.	Kualitas Lingkungan Hidup	7. Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi

Sasaran Program dimaksud didukung dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan target pada Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2., sebagai berikut:

Tabel 2.1. Program dan Sasaran Program bidang KSDAE

No.	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Satuan
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	78,5	Poin
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	13,8	Juta Hektar
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran	2,05	Triliun Rupiah
4.	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	210	Miliar Rupiah
5.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	500	Desa
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	55	poin
7.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	10	Juta Hektar



Flora TN BTS

Lokasi:
Taman Nasional BTS

Dokumentasi:
Taman Nasional BTS

Kupu-kupu

Lokasi:

Dokumentasi:
Muhammad Nurhidayat



BAB III

DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus secara nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal KSDAE mengalokasikan sebesar Rp. 660,5 Miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 1,925 Triliun pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Alokasi 2021 (Ribu Rupiah)
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	408.217.693
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	14.650.000
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	237.639.110
Total	660.506.803

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai berikut:

- i. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.
- ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.

Tabel 3.2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	8.280.876
			001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	37.263.618
		02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	74.609.196
			001-Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	5.150.000
			002-Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	95.174.335
			002-Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	9.839.617
			003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2.945.250
			006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	95.951.787

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	4.500.572
			001-Destinası Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	27.260.000
	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1.500.000
			001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	9.652.000
			002-Destinası Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	8.927.790
			003-Destinası Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	1.900.000
			004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	25.262.652
Total			408.217.693	

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, mempunyai sasaran pembangunan yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu, sasaran yang harus dicapai adalah percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Oleh karena itu, prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional 2 yang terkait dengan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar; (2) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

Tabel 3.3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	01-Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	8.600.000
			003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	6.050.000
Grand Total				14.650.000

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Ditjen KSDAE, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagai berikut:

- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional; (2) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar; (3) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat.
- ii. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya.

Tabel 3.4. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	002-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	760.000
	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1.120.075
			002-Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2.226.750

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
		05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	8.219.391
			001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	73.535.414
			001-Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	142.147.400
			002-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	9.630.080
Grand Total				237.639.110



Aulostomus chinensis

Lokasi:

-

Dokumentasi:
Eko Handoyo

Rusa

Lokasi:

-

Dokumentasi:

-



BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2021 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan pandemi Covid-19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Nomor S-903/MK.02/2020 dari Kementerian Keuangan, mendapatkan alokasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

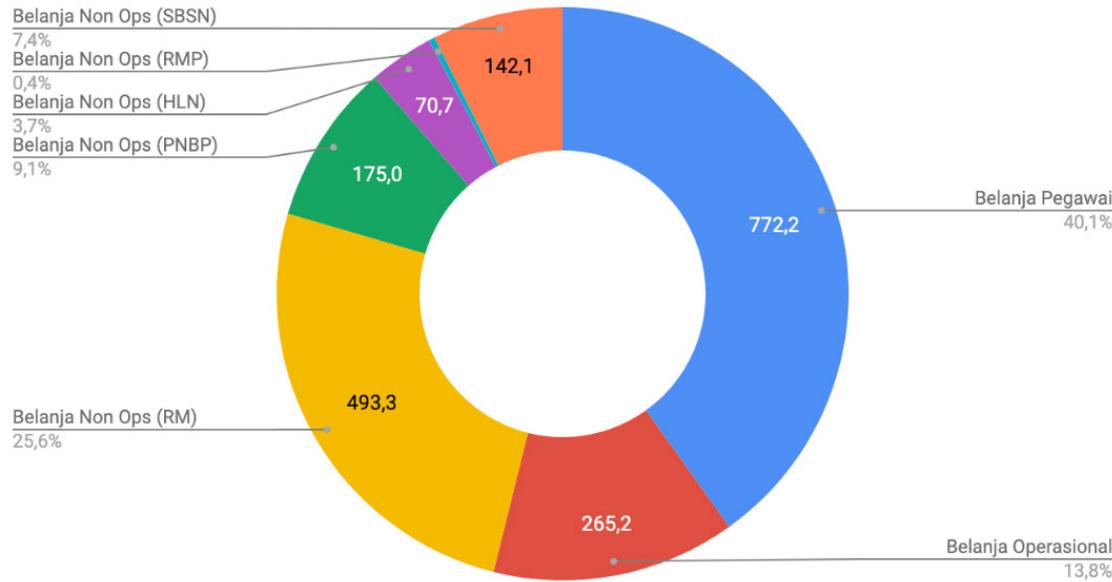
Tabel 4.1. Alokasi anggaran pada setiap program KLHK dalam rencana kerja tahun 2021

Kode	Program	Alokasi (Ribu Rupiah)
029.WA	Program Dukungan Manajemen	3.290.147.921,0
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.387.573.282,0
029.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	64.026.310,0
029.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	183.722.579,0
029.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	2.805.463.741,0
029.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	226.180.950,0
TOTAL		7.957.114.783,0

Dalam rangka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sesuai dengan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.46/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA 2021, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.925.381.253.000,-, dengan rincian per program sebagaimana tabel 4.2 serta rincian per jenis belanja dan sumber dana sebagaimana Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Alokasi anggaran pada program Ditjen KSDAE dalam rencana kerja tahun 2021

Kode	Program	Alokasi (Ribu Rupiah)
029.WA	Program Dukungan Manajemen	1.137.325.579,0
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	773.482.723,0
029.FD	Program Kualias Lingkungan Hidup	14.572.951,0
TOTAL		1.925.381.253,0



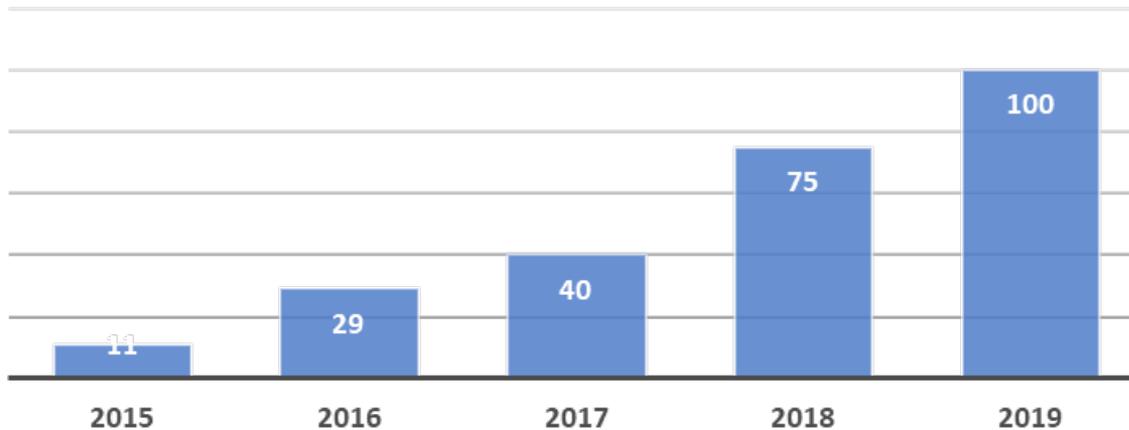
Gambar 4.1. Pagu Alokasi Anggaran per Jenis Belanja dan Sumber Dana

Pelaksanaan rencana kerja kedepan harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kinerja yang belum optimal, sehingga dapat dijadikan tolak ukur perencanaan pada 4 (empat) tahun ke depan, yaitu 2021, 2022, 2023 dan 2024, serta melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal KSDAE. Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja yang ditampilkan pada setiap indikator kinerja Program (IKP) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan memperhatikan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Berikut hasil laporan kinerja Ditjen KSDAE pada Tahun 2015-2019.

A. NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI MINIMAL 70%

Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan, Kawasan Konservasi tidak hanya berperan dalam menjaga keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya. Namun, Kawasan Konservasi juga dapat bermanfaat bagi daerah penyangga di sekitarnya. Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Nilai METT yang menunjukkan pengelolaan membaik pada Setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70 untuk dapat dinyatakan bahwa pengelolaannya berada pada level baik.

Pengelolaan kawasan konservasi yang baik akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalamnya, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran dilakukan pada Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Selain itu, di luar KSA/KPA juga terdapat Kawasan Taman Buru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan harus dilakukan penilaian terhadap pengelolaannya.

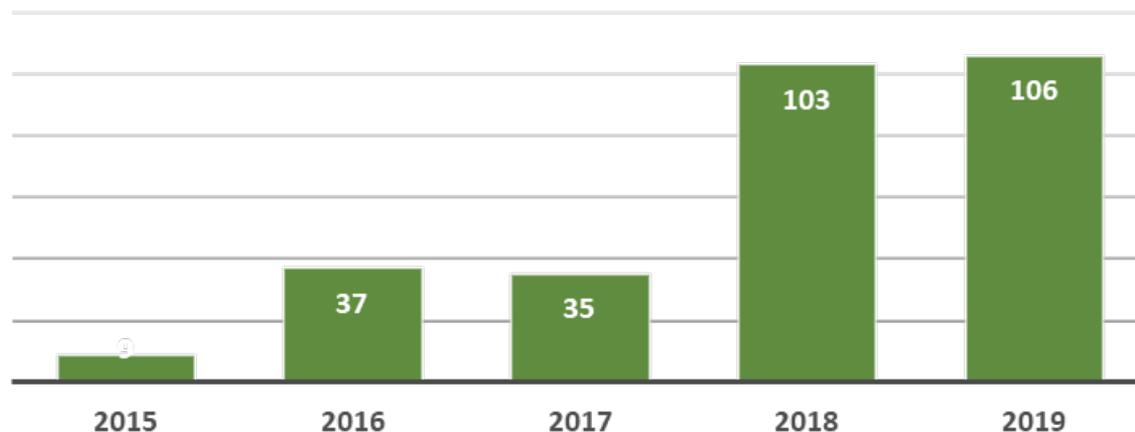


Gambar 4.2. Jumlah Kawasan Konservasi dengan nilai efektifitas pengelolaan minimal 70%

Sampai dengan saat ini, pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilakukan oleh Ditjen KSDAE menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang di atas 70 poin semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Tahun 2016, Kawasan konservasi yang dinyatakan sudah efektif tingkat pengolahannya berjumlah 29 unit. Namun, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 40. Peningkatan semakin signifikan ditunjukkan pada tahun 2018 dan 2019, yang mana jumlah Kawasan Konservasi yang telah efektif menjadi 70 unit di tahun 2018 dan 100 unit di tahun 2019.

B. JUMLAH KPHK NON-TN YANG TERBENTUK DAN BEROPERASI

Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk mengelola Kawasan Konservasi dengan skema Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), khususnya untuk Kawasan Non Taman Nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Taman Nasional dan Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar Taman Nasional dan Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam.



Gambar 4.3. Jumlah KPHK non-TN yang terbentuk dan beroperasi

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK untuk Kawasan Non Taman Nasional yang harus beroperasi. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan KPHK Kawasan Konservasi dapat dikelola secara efektif. Dari target lima tahunan, yaitu jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun, yaitu sebesar 106%.

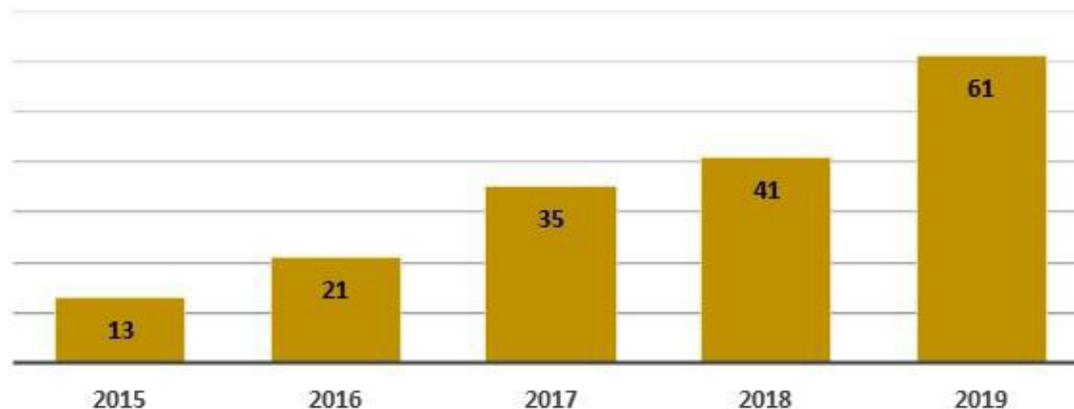
C. PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI 25 JENIS SATWA TERANCAH PUNAH PRIORITAS

Sesuai dengan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV/KKH/2015, satwa prioritas terancam punah yang dimonitoring populasinya sejumlah 25 spesies. Sampai dengan tahun kelima periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah sudah mencapai 12,84%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 10%, maka capaian kinerja sudah mencapai 128,4%. Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan keanekaragaman hayati.

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring disebabkan oleh kelahiran maupun penambahan individu di dalam suatu populasi satwa karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak.

D. JUMLAH UNIT KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL YANG TERBENTUK DAN DIOPTIMALKAN PENGELOLAANNYA

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya adalah sebanyak 48 unit. Sampai dengan tahun kelima Renstra, telah terealisasi sebanyak 61 unit atau sekitar 127,8%. Pencapaian hingga tahun 2019 adalah terbentuknya KEE yang telah ditetapkan kelembagaannya oleh Pemerintah Daerah setempat yang meliputi Kawasan Taman Kehati, Kawasan Koridor Satwa Liar dan Kawasan Karst.



Gambar 4.4. Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk (kumulatif)

E. JUMLAH KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEBARAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK YANG VALID DAN RELIABEL

Data dan informasi keanekaragaman hayati (kehati) perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya untuk sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan. Manfaat adanya basis data kehati adalah dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan kehati yang ada di Indonesia. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Peran langsung kehati diantaranya sebagai sumber pangan, kesehatan/obat-obatan. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 paket data, sehingga capaian kinerjanya 100%.

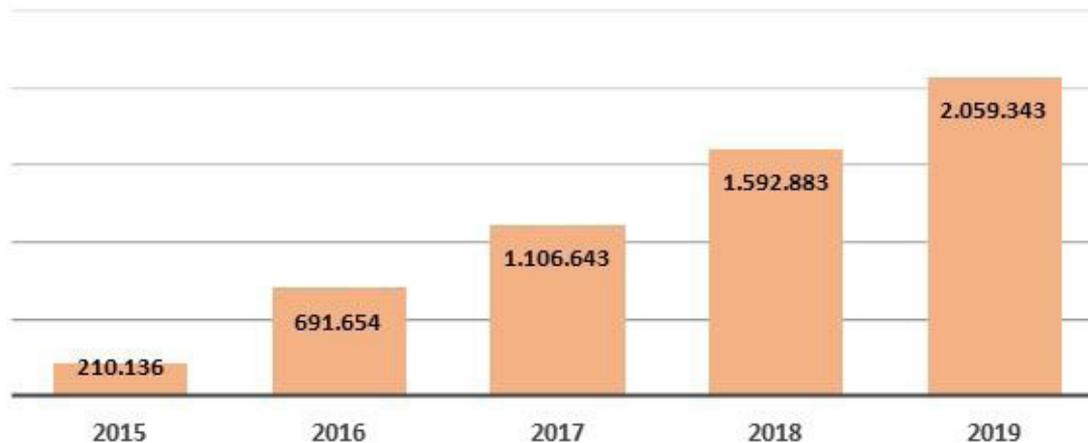
F. NILAI EKSPOR PEMANFAATAN SATWA LIAR DAN TUMBUHAN ALAM SERTA BIOPROSPECTING

Capaian nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting pada tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 43.327.000.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar

Rp.25.000.000.000.000,-. Capaian tersebut berupa devisa negara dari pemanfaatan 13 kelas komoditi, yaitu Mamalia, Reptil, Amphibi, Burung, Arthropoda, Ikan, Coral, Mollusca, Gaharu, Anggrek, Sonokeling, Pakis, dan Pasak Bumi.

G. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEgara KE KAWASAN KONSERVASI

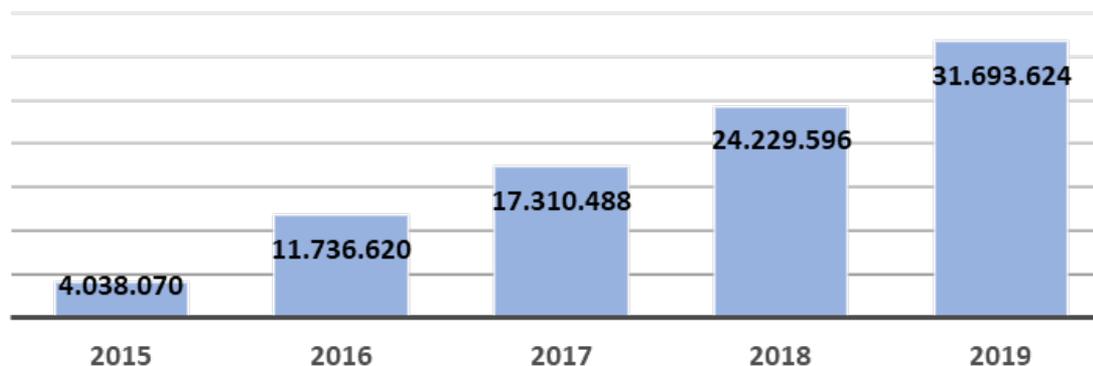
Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kawasan Konservasi adalah sebanyak 2.059.343 orang, dengan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 137,29% atau melebihi jumlah kunjungan dalam target kinerja. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke Kawasan Konservasi, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di seluruh Indonesia.



Gambar 4.5. Jumlah wisatawan mancanegara (kumulatif)

H. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA KE KAWASAN KONSERVASI

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Kawasan Konservasi adalah sebanyak 31.873.624 orang, dengan target Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 20.000.000 orang. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 159,37% atau melebihi jumlah kunjungan dalam target kinerja. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke Kawasan Konservasi, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di seluruh Indonesia.



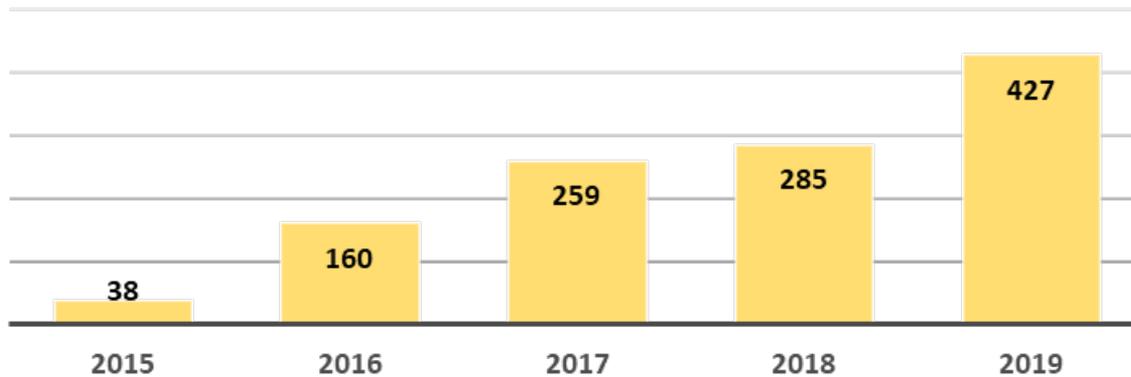
Gambar 4.6. Jumlah wisatawan nusantara (kumulatif)

I. JUMLAH KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (USAHA PARIWISATA ALAM SEBANYAK 100 UNIT. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR SEBANYAK 25 UNIT. DAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN GEOTHERMAL SEBANYAK 5 UNIT)

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 318 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut telah tercapai sebesar 318% atau sudah melampaui target yang ditetapkan. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Pada kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di Kawasan Konservasi, bentuk targetnya adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka pengusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi. Pada tahun 2018, kegiatan ini memberikan kontribusi PNPB untuk

Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 149.219.434,-. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 150 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun, maka target tersebut sudah tercapai sebesar 600% atau melampaui target kinerja.

Hutan mampu memasok energi terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini, sumber energi terbarukan belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi dan lain-lain. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan PLTP (panas bumi) dan PLTS (Surya) di beberapa lokasi di Indonesia. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 4 unit atau sebesar 80%.



Gambar 4.7. Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi (kumulatif)

Kangkareng Perut Putih

Lokasi:
Taman Nasional Baluran

Dokumentasi:
Endarto



BAB V

PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi pendorong dalam pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan

pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/*multiplier effect* dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong *situation room* (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keaneekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.



Tarsius
Tarsius bancanus

Lokasi:
-

Dokumentasi:
-

Hiu Paus
Rhincodon typus

Lokasi:
Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Dokumentasi:
Agustinus Mirino



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan pada Tahun 2021, Direktorat Jenderal KSDAE harus berkontribusi dalam menghidupkan kembali kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan. Selain menjawab tantangan di Tahun 2021, Direktorat Jenderal KSDAE harus selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, titik awal pelaksanaan RPJMN dan Rencana strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti menjadi dokumen berupa Rencana Kerja Eselon II dan UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2021 ini dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja program sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sebagai sarana dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi. Pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal KSDAE,

Wiratno

Jalak Bali

Lokasi:
Taman Nasional Bali Barat

Dokumentasi:
Agus Ngurah Krisna

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2021

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	LOKASI
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.120.075	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Pusat)
			002-Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2	Rekomendasi Kebijakan	2.226.750	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Pusat)
			003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	35	Rekomendasi Kebijakan	2.945.250	BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Sulawesi Selatan, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA Bengkulu, BKSDA D.I. Yogyakarta, BKSDA Jambi, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Maluku, BKSDA NAD, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan,
		REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	10.037.425	Hektar	8.280.876	BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Riau, BBKSDA Sulawesi Selatan, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA Bengkulu, BKSDA Jambi, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Maluku, BKSDA NAD, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan.
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Hibah Luar Negeri Forest Programme III - Sulawesi	2	Lembaga	20.009.839	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (Pusat), BBTN Lore Lindu
			PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	5	Rekomendasi Kebijakan	5.150.000
			002-Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi)	56	Rekomendasi Kebijakan	9.839.617	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (Pusat)

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	LOKASI
		REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.704	Hektar	33.193.152	BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Riau, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA D.I. Yogyakarta, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Maluku, BKSDA NAD, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBTN Bukit Barisan Selatan, BBTN Gunung Gede Pangrango, BBTN Gunung Leuser, BBTN Kerinci Seblat, BBTN Lore Lindu, BBTN Teluk Cendrawasih, BTN Aketajawe Lolobata, BTN Baluran, BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Batang Gadis, BTN Berbak dan Sembilang, BTN Bukit 12, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Bukit Tiga Puluh, BTN Bunaken, BTN Gunung Halimun Salak, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Palung, BTN Gunung Rinjani, BTN Karimun Jawa, BTN Kayan Mentarang, BTN Kepulauan Seribu, BTN Kepulauan Togean, BTN Komodo, BTN Lorentz, BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, BTN Manusela, BTN Meru Betiri, BTN Rawa Aopa Watumohai, BTN Sebangau, BTN Siberut, BTN Taka Bonerate, BTN Tambora, BTN Tanjung Puting, BTN Tesso Nilo, BTN Ujung Kulon, BTN Wakatobi
			002-Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	233.062	Hektar	95.174.335	Seluruh UPT (74 Satker)
5422-Konservasi Spesies dan Genetik	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati		1	Rekomendasi Kebijakan	500.000	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Pusat)
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati		4	Rekomendasi Kebijakan	9.630.080	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Pusat)
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan		117	Lembaga	8.219.391	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Pusat), BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Riau, BBKSDA Sulawesi Selatan, BBKSDA Sumatera Utara,

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	LOKASI
							BKSDA Bali, BKSDA Bengkulu, BKSDA D.I. Yogyakarta, BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jambi, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA NAD, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA Sumatera Selatan
			002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	428	Lembaga	4.500.572	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Pusat), 26 UPT KSDA (8 Satker BBSKSDA, 16 Satker BKSDA), BBTN Gunung Gede Pangrango, BTN Bukit Tiga Puluh, dan BTN Gunung Halimun Salak
		RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	3	Unit	142.147.400	BKSDA Maluku, BTN Rawa Aopa Watumohai, dan BTN Ujung Kulon
		REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	13.017.245	Hektar	73.535.414	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Pusat), dan 26 UPT KSDA (8 Satker BBSKSDA, 16 Satker BKSDA)
	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	8	Rekomendasi Kebijakan	2.800.000	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pusat)
002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan			23	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pusat)	
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		001-HLN Forest Investment Program Project I	2	Lembaga	7.194.570	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (Pusat), dan BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	
QAH-Pelayanan Publik Lainnya		001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	20	layanan	1.500.000	BBSKSDA Nusa Tenggara Timur, BBSKSDA Riau, BKSDA Bali, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BBTN Bukit Barisan Selatan, BBTN Kerinci Seblat, BBTN Lore Lindu, BTN Bali Barat, BTN Berbak dan Sembilang, BTN Bogani Nani Wartabone, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Gunung	

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	LOKASI
							Palung, BTN Gunung Rinjani, BTN Kayan Mentarang, BTN Kutai, BTN Sebangau.
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	43	Kelompok Masyarakat	9.652.000	BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Papua, BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBTN Teluk Cendrawasih, BTN Bali Barat, BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Rinjani, BTN Kelimutu, BTN Tambora, BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA D.I. Yogyakarta, BBTN Gunung Leuser, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Komodo, BTN Bunaken, BTN Taka Bonerate, BTN Wakatobi
		RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinas Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15	Unit	27.260.000	BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Papua, BBKSDA Riau, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Nusa Tenggara Barat, BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum, BBTN Bromo Tengger Semeru, BBTN Teluk Cendrawasih, BTN Bali Barat, BTN Bantimurung Bulusaraung, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merbabu, BTN Gunung Rinjani, BTN Kelimutu, BTN Tambora
			002-Destinas Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	7	Unit	8.927.790	BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Sumatera Utara, BKSDA D.I. Yogyakarta, BBTN Gunung Leuser, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Komodo
			003-Destinas Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	3	Unit	1.900.000	BTN Bunaken, BTN Taka Bonerate, BTN Wakatobi
			004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	53	Unit	25.262.652	BBKSDA Nusa Tenggara Timur, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Bali, BKSDA Bengkulu, BKSDA DKI Jakarta, BKSDA Jambi, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Tengah, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Maluku, BKSDA NAD, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Sulawesi Utara, BKSDA Sumatera Barat, BKSDA

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	LOKASI
							Sumatera Selatan, BBTN Bukit Barisan Selatan, BBTN Gunung Gede Pangrango, BBTN Kerinci Seblat, BBTN Lore Lindu, BTN Aketajawe Lolobata, BTN Batang Gadis, BTN Berbak dan Sembilang, BTN Bogani Nani Wartabone, BTN Bukit 12, BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Bukit Tiga Puluh, BTN Gunung Ceremai, BTN Halimun Salak, BTN Gunung Palung, BTN Karimun Jawa, BTN Kayan Mentarang, BTN Kepulauan Seribu, BTN Kepulauan Togeang, BTN Kutai, BTN Lorentz, BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti, BTN Manusela, BTN Meru Betiri, BTN Rawa Aopa Watumohai, BTN Sebangau, BTN Siberut, BTN Tanjung Puting, BTN Tesso Nilo, BTN Ujung Kulon, BTN Wasur, dan BTN Way Kambas.
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	EAA-Layanan Perkantoran	994-Layanan Perkantoran	75	layanan	1.037.418.675	Satker Pusat dan 74 UPT
		EAC-Layanan Umum	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	28.741.344	Satker Pusat
			970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	74	layanan	50.538.000	74 UPT
		EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	164	Unit	10.090.370	Satker Pusat dan 74 UPT
		EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal	77	Unit	10.537.190	Satker Pusat dan 74 UPT
Grand Total						1.925.381.253	